

**GENDER DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN
(Studi kasus pada kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim di Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2016)**

(Skripsi)

**Oleh:
VIVI ALVIONITA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

GENDER DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN (Studi kasus pada kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016)

OLEH

VIVI ALVIONITA

Kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur diwarnai dengan kehadiran Chusnunia Chalim sebagai kepala daerah perempuan pertama di Provinsi Lampung bahkan untuk Pulau Sumatera. Pada awal kepemimpinannya Chusnunia sudah mendirikan rumah ramah anak untuk dapat memperhatikan hak-hak anak dilampung timur. Oleh sebabnya kepemimpinan perempuan menjadi hal yang penting untuk diteliti ditinjau dari aspek gender.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis refleksi gender dan kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari manfaat keterlibatan perempuan diranah publik antara lain dari segi prioritas dan hasil politik, praktek dan perilaku politik, respon terhadap kebutuhan perempuan, respon terhadap kebutuhan masyarakat serta dari segi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya manfaat ketika perempuan terlibat dalam ranah publik. Pertama, pada prioritas dan hasil politik, Isu sosial menjadi salah satu isu yang diangkat dalam kepemimpinan perempuan. Kedua, perubahan praktek dan perilaku politik, yaitu kecenderungan praktek nepotisme dalam artian mengangkat keluarga, sanak saudara atau teman dekat cenderung minim terjadi pada kepemimpinan perempuan. Ketiga, respon yang baik pada kebutuhan perempuan.

Keempat pemerintah yang responsif pada kebutuhan masyarakat. Kelima, demokrasi dan tata kelola pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik. Keenam, pada kepemimpinannya Chusnunia Chalim cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional.

Kata kunci: Gender, Kepemimpinan, Pemerintahan

ABSTRACT

GENDER AND THE GOVERNMENT LEADERSHIP IN DISTRICT (Case study on the leadership of Chusnunia Chalim Regent in the District of East Lampung in 2016)

By

VIVI ALVIONITA

Government leadership in East Lampung Regency is portrayed by the presence of Chusnunia Chalim as the first female that becoming region head in Lampung province even for in Sumatra with programs and policies that indicated some differences between male and female leaders viewed from the gender aspect.

This study is aimed to analyze gender reflection and government leadership in district of East Lampung in terms of some aspects that occurred when women are involved in the public sphere, among others in terms of priorities and political outcomes, political practices and behavior, responses to women's needs, responses to community needs in terms of democracy, and governance. This qualitative research using data collection method by interview and documentation study.

The results showed that the leadership of the government in East Lampung District experienced some changes when led by the head of the women's region. Firstly, in priorities and political outcomes, social issues become one of the issues that raised in women's leadership. Second, the change of practice and political behavior, namely the tendency of nepotism practices in prioritizing family, relatives or close friends tend to be minimum in women's leadership. Third, good response to the needs of women. Fourth, government are responsive to the needs of the community. Fifth, democracy and governance are heading to the better. Sixth, in her leadership Chusnunia Chalim tends to use transformational leadership style.

Keywords: Gender, Leadership, Government

**GENDER DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN
(Studi kasus pada kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2016)**

Oleh:

VIVI ALVIONITA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

**: GENDER DAN KEPEMIMPINAN
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN
(Studi Kasus pada Kepemimpinan
Bupati Chusnunia Chalim di
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2016)**

Nama Mahasiswa

: Ovi Alvionita

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1346021032

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

Andri Marta, S.IP., M.IP.

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

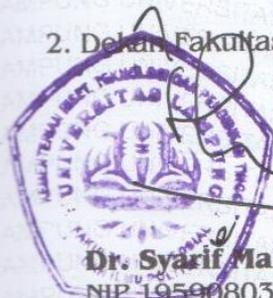
1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ari Darmastuti, M.A.

Sekretaris : Andri Marta, S.IP., M.IP.

Penguji : Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Juni 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Juni 2017



Vivi Alvionita
NPM. 1346021032

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Vivi Alvionita yang dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 10 Juni 1995 dari pasangan Bapak Irawan MJ dan Ibu Nurhidayati.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tingkat Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 1 Pugung Raharjo, Lampung Timur pada tahun 2001 dan lulus di tahun 2007.

Penulis menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sekampung Udik pada tahun 2007 dan lulus di tahun 2010. Selanjutnya, jenjang pendidikan penulis tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Metro dan lulus pada tahun 2013. Selama SMA penulis aktif dalam organisasi Palang Merah Remaja di SMA Negeri 1 Kota Metro dan pernah menjadi juara 1 PMR tingkat kota Metro. Penulis melanjutkan karir akademik pada tahun 2013 dengan tercatat sebagai mahasiswi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis mengikut beberapa kegiatan organisasi dibangku perkuliahan. Riwayat organisasi penulis dimulai sejak menjadi mahasiswa baru yaitu sebagai anggota Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Tingkat Universitas pada tahun 2013. Pada tahun 2015 penulis tercatat sebagai anggota Bidang Kajian Keilmuan HMJ Ilmu Pemerintahan.

MOTTO

“The women is the heart of the home”

(Mother Teresa)

“To be liberated, women must feel free to be herself”

(Indira Gandhi)

“Kami berikhtiar supaya kami teguh sungguh, sehingga kami sanggup berdiri sendiri, menolong diri sendiri. Dan siapa yang dapat menolong dirinya sendiri akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna pula”

(R.A Kartini)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas segala cinta dari Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Irawan MJ dan Nurhdayati

Adik terkasih

Ria Irawan dan Ade Aulia Irawan

Sahabat, Teman seperjuangan serta Adik-adik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Almamater yang penulis banggakan dan cintai

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Gender dan Kepemimpinan Pemerintahan di Kabupaten (studi kasus pada kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016)” merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sebagai bentuk dari adanya keterbatasan kemampuan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini mampu bermanfaat untuk kebutuhan akademik khususnya dalam perkembangan penelitian kajian ilmu sosial dan ilmu politik.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yaitu Ibu Nurhidayati dan Bapak Irawan MJ atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang tidak akan mampu penulis balas atas banyaknya kebaikan tersebut. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kasih sayang-Nya, serta balasan atas segala kebaikan untuk Ibunda dan Ayahanda.
2. Saudara kandung yaitu Ria Irawa dan Ade Aulia Irawan sebagai penghibur dalam keluarga. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan untuk bisa membahagiakan dan menjadi anak-anak kebanggaan orang tua.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, MA selaku pembimbing utama. Terima kasih atas bimbingan yang penuh kehangatan, arahan, bantuan dan saran sehingga penulis memperoleh pengetahuan yang luas dalam penyusunan skripsi. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas segala keramahan dan ilmu yang diberikan semasa perkuliahan yang dapat membuka jendela pengetahuan penulis atas ilmu yang begitu luas di depan. Semoga atas segala yang ibu berikan menjadi kebaikan untuk ibu di dunia maupun akhirat.
4. Bapak Andri Marta, S.IP, M.IP selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas bimbingan penuh ilmu, masukan, dukungan serta motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik dan benar. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas keterbukaan, pengetahuan serta segala bantuan selama perkuliahan, sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis. Budi baik bapak semoga menjadi amalan kebaikan untuk dunia dan akhirat.

5. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si selaku pembahas dosen. Terima kasih atas kritik, saran dan bimbingan sehingga skripsi ini memiliki kemajuan yang signifikan pada setiap perbaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan, yang menambah khasanah pengetahuan penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah selalu tercurah untuk ibu di dunia dan akhirat.
6. Seluruh Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, memberikan ilmu, pengalaman, pembelajaran hidup serta pengetahuan yang tak pernah tergerus waktu.
7. Kakak perempuan tercinta, Winda Dwiastuti Herman, terima kasih telah mengisi hari hari penulis, memberikan banyak bantuan, dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian yang begitu berarti bagi penulis. Terima kasih juga untuk selalu mendampingi penulis, menghibur dan menjadi kakak yang baik bagi penulis. Semoga silaturahmi baik kita tetap terjalin.
8. Sahabat tercinta, Restiani Damayanti, Fina Ria Tisa, Kenn Sindy Kirana Julia, Vika Anggraini, Rian Adi Saputra, Danang Marhaens, Ahmad Irfan, Tri Hendra, Ardyanto, Nur Kalim, Yogi Noviantama, Danni Pangaribowo, Iqbal Nugraha, Restu Aditya, Yones, Indra terimakasih telah mengisi hari-hari penulis sejak menjadi mahasiswa baru sampai sekarang memberikan berbagai pelajaran dan kesan dengan canda-tawa, keluh-kesah, dan tangis haru serta bangga. Terima kasih untuk kesempatan bisa mengexplore petualangan-petualangan seru bersama kalian. Persahabatan ini semoga tidak lekang oleh waktu dan habis ditelan zaman.

9. Kakak yang penulis hormati, Syaifulloh dan Habrianda Bukit. Terima kasih untuk segala bantuan, motivasi, dukungan dan doa yang telah diberikan. Tiada harapan penulis melainkan kebaikan untuk kalian pula.
9. Sahabat kecil penulis, Yunita Rahmawati, Damayanti dan Asteria Kirana Sari, sangat beruntung penulis bersahabat dengan kalian, persahabatan yang sedari kecil terjalin, semoga terjalin selamanya.
10. Teman-teman KKN tersayang, Uliana N Melin, Intan Mody dan Jesika Debora Simanjutak. Terima kasih untuk canda, tawa, dukungan dan kebersamaan yang masih terjalin sampai sekarang.
11. Teman-teman seperjuangan Dormatio, Tiara Dayu, Azizah, Maria, Ina, Oca Nadia Maudyna, Ipnika Nurfasari, Agnesia Diknas, Risky Nitha, Ibnu Fadil, Bagaskoro, Raindi Zikri dan semua teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2013. Terima kasih untuk hampir 4 tahun kebersamaannya. Suatu kebahagiaan bisa bertemu dengan kalian semua. *See you on top.*

Bandar Lampung, 1 Juni 2017

Vivi Alvionita

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Gender	12
B. Konsep Kepemimpinan Pemerintahan	24
C. Gaya Kepemimpinan.....	25
D. Kerangka Pemikiran	29

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
D. Informan	39
E. Jenis Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Pengolahan Data	45
H. Teknik Analisis Data	46
I. Teknik Keabsahan Data	48

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Lampung Timur	50
B. Kondisi Geografis dan Administratif	51
C. Kependudukan	54
D. Pembangunan Manusia	56
E. Perekonomian.....	56
F. Kelembagaan Pemerintah Daerah.....	58

G. Gambaran Umum Profil Chusnunia Chalim, data Pemilih Perempuan dan Pengguna Hak Pilih Pada Pilkada 2015	60
---	----

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prioritas dan Hasil Politik	63
B. Praktik dan Perilaku Politik	70
C. Respon yang Baik pada Kebutuhan Perempuan	80
1. Program untuk Merespon isu terkait perempuan	80
2. Kebijakan dan program yang dibuat dapat menghimpun seluruh kebutuhan perempuan.....	82
D. Responsive pada Kebutuhan Masyarakat	88
E. Demokrasi Lebih Baik dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.....	92
1. Pelibatan perempuan dalam pengambilan Keputusan	93
2. Kepemimpinan perempuan menunjang instansi Pemerintah daerah melaksanakan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	95
F. Kepemimpinan	101
1. Artikulasi Visi	101
a. Visi disampaikan dengan jelas	101
b. Memberi tantangan untuk mencapai visi.....	102
2. Relasi dengan Pengikut	104
a. Mendengarkan dan memenuhi kebutuhan pegawai yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah.....	104
b. Mendelegasikan kewenangan	105
3. Motivasi Pengikut	107
a. Membangkitkan semangat dan mendorong kreativitas pegawai	108
b. Mendorong pegawai untuk berinovasi dan bekerja keras	108
4. Output Pengikut.....	110
a. Memiliki rasa kagum dan percaya kepada Pemimpin.....	110
b. Selalu termotivasi untuk meningkatkan Kinerja	111
5. Proses Pemecahan Masalah	112

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Anggota DPRD Perempuan Provinsi Lampung Periode 2014-2019.....	4
Tabel 2. Perempuan dalam Jabatan Strategis di Provinsi Lampung	5
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4. Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Lampung Timur	61
Tabel 5. Triangulasi Data Penelitian	64
Tabel 6. Triangulasi Data Penelitian	70
Tabel 7. Triangulasi Data Penelitian	76
Tabel 8. Triangulasi Data Penelitian	83
Tabel 9. Triangulasi Data Penelitian	86
Tabel 10. Triangulasi Data Penelitian	92
Tabel 11. Triangulasi Data Penelitian	95
Tabel 12. Triangulasi Data Penelitian	98
Tabel 13. Triangulasi Data Penelitian	100
Tabel 14. Triangulasi Data Penelitian	102
Tabel 15. Hasil Pembahasan	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	33

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015. Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur/bupati/walikota yang dilaksanakan oleh 264 daerah. Salah satu daerah yang melaksanakan pilkada adalah Provinsi Lampung dengan 8 wilayah pelaksana pilkada serentak yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Way Kanan, Pesawaran, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Lampung Timur dan Lampung Selatan (www.setkab.go.id/mendagri-tetapkan-pelaksanaan-pilkada-serentak, edisi 27 Juli 2015, diakses pada 31 Agustus 2016 pukul 16.35).

Fakta menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 lalu, dari 810 peserta pilkada terdapat 116 calon kepala daerah perempuan yang turut serta dalam kompetisi demokratisasi lokal tersebut. Pada pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 dari 116 calon perempuan yang mengikuti pilkada terdapat 46 yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan salah-satunya terdapat di Provinsi Lampung (sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam kpu.go.id, edisi 24 Agustus 2015 diakses tanggal 15 Agustus 2016, pukul 13.56 WIB).

Keikutsertaan calon perempuan pada pilkada serentak 2015 menunjukkan adanya partisipasi perempuan untuk tampil dalam ranah publik. Fakta di atas terjadi pada pilkada di Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mengikuti pilkada serentak tahun 2015, merupakan kabupaten yang dimenangkan oleh calon perempuan. Hasil pilkada serentak 2015 menjadikan Chusnunia Chalim sebagai kepala daerah perempuan pertama di Provinsi Lampung.

Kemenangan Chusnunia Chalim pada pilkada 2015 menjadi hal yang sangat tidak terduga, mengingat kemenangan perempuan belum pernah terjadi pada pilkada sebelumnya di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Timur. Chusnunia dapat mengungguli lawan politiknya Yusron Amirullah pada kontestasi politik lokal tersebut. Chusnunia telah mampu menarik simpati dan hati pemilih di Kabupaten Lampung Timur dengan mendapatkan suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebanyak 53,14% pasangan Chusnunia-Zaiful lebih unggul dari Yusron Amrillah-Sudarsono (sumber: KPU Kabupaten Lampung Timur, diakses tanggal 22 Desember 2016, pukul 18:55 WIB).

Keberhasilan Chusnunia Chalim dalam pilkada 2015 menunjukkan adanya representasi perempuan tampil di sektor publik. Kontestasi politik lokal

tersebut menandai adanya kompetisi secara terbuka. Fenomena ini menjadi salah satu hal yang membuat isu kepemimpinan perempuan menjadi semakin menarik untuk diperbincangkan.

Global trend memperlihatkan peran perempuan selama ini sangat minim dalam politik maupun pemerintahan. Minimnya keterwakilan perempuan terjadi di Indonesia. Keterwakilan perempuan dalam konteks Indonesia menurut versi *United Nations Development Programme* yaitu bahwa Indonesia tingkat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2009-2014 hanya 22,58 %. Tingkat provinsi keterwakilan perempuan hanya 13,53%, dan untuk tingkat kabupaten 10%. Pada akhir tahun 2009 hanya satu dari 33 gubernur terpilih adalah perempuan, dari 440 kabupaten/kota hanya terdapat 10 bupati/walikota dan 12 wakil walikota perempuan (dimuat dalam undp.or.id, diakses tanggal 13 November 2016, pukul 18:55 WIB).

Minimnya keterwakilan perempuan di ranah publik untuk Provinsi Lampung dapat dilihat dari data-data keterwakilan perempuan yang dirilis oleh UNDP pada periode 2009-2014 yaitu bahwa keterwakilan perempuan dari Provinsi Lampung di DPR RI adalah 5 orang atau 27,78 % dari jumlah calon terpilih dapil Lampung. Keterwakilan perempuan asal Lampung di DPD RI sebanyak 0%. Keterwakilan perempuan di DPRD tingkat Provinsi Lampung adalah 16% (dimuat dalam undp.or.id, diakses tanggal 22 November 2016, pukul 15:55 WIB).

Keterlibatan perempuan di ranah publik untuk Provinsi Lampung dapat dilihat dari perjalanan karir perempuan-perempuan dari Provinsi Lampung. Data menunjukkan bahwa hanya ada beberapa perempuan di Provinsi Lampung yang menduduki jabatan-jabatan publik seperti Itet Trijajati Sumariyanto dan Usmawarnie Peter yang menjadi anggota DPR RI selama dua periode serta Hj. Hariyanti Syafrin yang merupakan anggota DPD RI periode 2004-2009 (dimuat dalam KPU.go.id, diakses tanggal 16 Januari 2017, pukul 14:55 WIB). Pada pemilu legislatif 2014 hanya 12 perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung diantaranya:

Tabel 1. Anggota DPRD perempuan Provinsi Lampung periode 2014-2019

No.	Nama	Partai
1.	Hj. Sahanan	Nasdem
2.	Hj. Sahyana, SE	Nasdem
3.	Dr. Hj. Asih Fatwanita	Nasdem
4.	Karlina SE	PKB
5.	Aprilliati	PDIP
6.	Hj. Eva Dwiyana	PDIP
7.	Hj. Syafariah Widiyanti ZP, SH. MH	PDIP
8.	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos	Golkar
9.	Hj. Mega Putri Tarmzi, SE, MM	Golkar
10.	Elly Wahyuni, SE, MM	Gerindra
11.	Asmara Dewi	PAN
12.	Hj. Zeldayati	PPP

(sumber: KPU Republik Indonesia, edisi 12 Mei 2014).

Minimnya keterlibatan perempuan di ranah eksekutif untuk provinsi lampung dapat dilihat dari beberapa perempuan yang menduduki beberapa jabatan strategis yaitu seperti:

Tabel 2. Perempuan dalam Jabatan Strategis di Provinsi Lampung

No.	Nama	Jabatan
1.	Choiria Pandarita	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
2.	Theresia Sormin	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3.	Bayana	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan protokol
4.	Reihana	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5.	Dewi Budi Utami	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
6.	Herlina Warganegara	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
7.	Dessy Desmaniar Romas	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
8.	Ferynia	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
9.	Ratna Dewi	Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
10.	Fauziah	Kepala Biro Perlengkapan Daerah

Sumber: diolah oleh peneliti pada 15 Januari 2017

Diskriminasi pada perempuan menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan peluang perempuan untuk mendapatkan kekuasaan di ranah publik. Dominasi laki-laki dan budaya patriaki menjadi alasan termarginalnya peran perempuan dalam penentuan arah sebuah kebijakan. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan secara psikologis daripada rasionalitas dalam menentukan sesuatu. Perempuan dianggap tidak dapat memimpin dan menentukan kebijakan dalam kehidupan bernegara. Asumsi tersebut berakibat mayoritas kebijakan kurang memperhatikan aspek gender.

Diskriminasi ini menggambarkan fenomena *glass ceiling* sebagai penyebab terhambatnya peningkatan karir perempuan di jajaran angkatan kerja.

Glass ceiling mengilustrasikan barikade tak nampak yang menghambat karir dalam pekerjaan perempuan. *Stereotyping, prejudice, dan bias* gender merupakan penyebab terjadinya *glass ceiling* dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang dimana perempuan dipandang memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada laki-laki secara sadar maupun tak sadar. Data-data keterwakilan perempuan dalam ranah nasional maupun daerah di atas memperlihatkan masih sulitnya perempuan untuk dapat menduduki beberapa jabatan-jabatan strategis dalam karirnya. hal inilah yang kemudian membuat isu kesetaraan gender makin disuarakan.

Isu kesetaraan gender bermuara pada konsepsi bahwa perlunya keterlibatan perempuan dalam ranah publik. Konsepsi itupun banyak diteliti oleh berbagai organisasi di dunia, salah satunya oleh *Inter-parliamentary Union (IPU)*. IPU pada tahun 2000 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi ketika perempuan terlibat dalam ranah publik yang dapat menjadi alasan-alasan pentingnya keterlibatan perempuan dalam ranah publik. IPU menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah publik membuat adanya pergeseran prioritas dan hasil politik, perubahan pada proses politik, pergeseran pada perilaku dan praktik politik serta dapat memperluas dan memperkaya proses politik.

Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan dapat meningkatkan responsifitas terhadap kebutuhan masyarakat terutama perempuan. Kebijakan juga akan lebih mengarah pada kesetaraan gender. Partisipasi perempuan dalam ranah publik juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan politik, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap politik, peningkatan transparansi serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang akan menuju kepada demokrasi yang lebih baik.

Kepemimpinan kepala daerah perempuan menjadi hal yang menarik untuk dipelajari. Pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah telah meletakkan peranan kepala daerah sangat strategis. Kepala daerah juga merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional dan merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas tujuan organisasi pemerintah daerah. Kepala daerah adalah sosok penting yang harus bisa membawa nilai-nilai perubahan dalam suatu organisasi publik agar bisa menjadi sebuah organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan dapat menghadapi tantangan-tantangan organisasi masa kini.

Kemenangan Chusnunia pada pilkada 2015 sebagai kepala daerah perempuan menarik perhatian peneliti untuk menelaah keterkaitan gender dan kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2016. Terpilihnya Chusnunia menjadi sajarah baru bagi perempuan untuk pertama kalinya memimpin daerah khususnya di Pulau Sumatera. Kemenangan ini

menjadi tanda bahwa optimisme terhadap kepemimpinan perempuan mulai lahir di masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Realita menunjukkan bahwa kepemimpinan Chusnunia dalam kurun waktu 9 bulan ternyata sudah bisa menggagas program baru yang belum pernah dibuat pada kepemimpinan sebelumnya. Fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Lampung Timur mendasari pembentukan program Desa Ramah Anak untuk Desa-desa di Kabupaten Lampung Timur (sumber: Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur, dalam www.lampungtimurkab.go.id, edisi 28 Juni 2016, diakses pada 14 November 2016, pukul 21.55 WIB). Program ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekerasan anak sekaligus program perlindungan pertama terhadap anak di Kabupaten Lampung Timur.

Pada awal kepemimpinannya sebagai Bupati, Chusnunia memilih untuk melunasi semua hutang Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2010 kepada pemerintah pusat meskipun akhirnya Kabupaten Lampung Timur mengalami sedikit defisit anggaran (dimuat dalam harianpilar.com, diakses tanggal 14 November 2016, pukul 18:55 WIB). Program dan keputusan yang diambil oleh Chusnunia ini menjadi hal yang menarik karena mengindikasikan beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari aspek gender baik dari segi pemikiran, kemanusiaan, prioritas, kepentingan, dan pengalaman.

Dibawah ini beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1	Wahyu Ismatullah (2014)	Kepemimpinan Perempuan dalam pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya	Melihat kepemimpinan perempuan dalam sudut pandang Hadist Islam
2	Zulfikri (2010)	Konsep Kepemimpinan Perempuan (Studi Komparasi atas Penafsiran Nasarudin Umar dan K.H Husein Muhammad)	Pelaksanaan kepemimpinan perempuan dalam dengan pedoman Al-Qur'an
3	Sekar Cahyo Laksanti (2014)	Potret Kepemimpinan Perempuan dan sudut pandangan laki-laki.	Cara kepemimpinan perempuan dalam memberikan objektivitas perizinan di wilayah Pemerintah Daerah.
4	Lia Octavina (2008)	Peranan Kepemimpinan Wanita dalam Jabatan Publik (Studi pada Pegawai Perpajakan)	Pengaruh kepemimpinan perempuan dalam peningkatan pendapatan pajak di kota Medan.
5.	Purwati Ayu Rahmi (2015)	Kepemimpinan Kepala Daerah (studi kasus walikota Surabaya Tri Rismahari dalam perspektif emosional intelegent)	Pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Surabaya.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kepemimpinan kepala daerah perempuan pertama di Provinsi Lampung. Selanjutnya apakah bisa melakukan transformasi baru terhadap organisasi pemerintahan di daerah dan membawa perubahan pada peningkatan kinerja aparatur sipil negara serta taraf kehidupan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur ke arah yang lebih baik. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis berkaitan dengan gender dan kepemimpinan pemerintahan di

kabupaten dengan studi kasus pada kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana refleksi gender dan kepemimpinan pemerintahan di kabupaten, studi kasus pada kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui refleksi gender dan kepemimpinan pemerintahan di kabupaten, studi kasus pada kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memiliki kegunaan sebagai refleksi teori gender dan kepemimpinan, serta pentingnya keterlibatan perempuan di ranah publik.

2. Kegunaan Praktis

Memiliki kegunaan sebagai bahan masukan bagi seluruh elemen masyarakat, birokrat dan elemen negara tentang kepemimpinan

perempuan dalam politik dan pemerintahan. Selain itu, untuk mengetahui pola kecenderungan kebijakan yang responsif gender.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Gender

Kerangka teoritis penelitian ini akan diawali dengan *grand theory* tentang gender. Kepemimpinan dewasa ini menjadi sangat identik dengan konsep gender. Gender berasal dari bahasa latin “*genus*” yang berarti tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki, yang ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrat. Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya. Konsep gender juga termasuk karakteristik atau ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh keluarga dan atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya dan interpretasi agama.

Secara umum, pekerjaan memasak, mengurus anak, mencuci selalu disebutkan hanya sebagai pekerjaan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan ciptaan masyarakat dari budaya tertentu, padahal pekerjaan tersebut dapat juga dipertukarkan dengan laki-laki atau dapat dikerjakan oleh laki-laki. Namun pandangan ini bisa saja berbeda dari satu budaya dengan

budaya yang lain. Karakteristik atau ciri-ciri ini menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebut perbedaan gender. Ini sering mengakibatkan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Peran ini dipelajari dan berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain. Peran sosial atau yang sering disebut peran gender ini berpengaruh terhadap pola relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang sering disebut sebagai relasi gender.

Pada perkembangannya, ada beberapa teori yang membahas mengenai gender, teori tersebut diantaranya:

1. Teori Nature

Teori Nature adalah perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan yang didasarkan faktor biologis. Secara psikologis, beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lembut, baik hati, emosional, pasif dan submisif, dan laki-laki adalah makhluk yang perkasa, aktif, kuat dan agresif. Pada hakekatnya, perempuan adalah pengurus rumah yang baik, pandai mengurus suami dan anak, juga memasak untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi laki-laki adalah kepala keluarga yang harus mencari nafkah demi kehidupan keluarganya. Maka dapat disimpulkan bahwa teori nature adalah pandangan tentang pembagian tugas dan hakekat kehidupan laki-laki dan perempuan yang telah disetujui oleh masyarakat luas.

2. Teori Nature

Teori ini adalah kebalikan dari teori nature, yang menolak pandangan terhadap segala pembagian yang telah disetujui. Teori ini beranggapan bahwa pembagian pekerjaan dan wilayah ditentukan berdasarkan proses belajar dan lingkungan. Jika dilihat dari sisi politik, teori nature hanya dibentuk karena laki-laki ingin merasa lebih unggul di bandingkan perempuan.

Perkembangan isu gender membuat kepemimpinan tidak lagi identik dengan laki-laki. Gerakan feminis pada tahun 1960-an berusaha mendobrak nilai-nilai patriarki yang dilindungi oleh kokohnya tradisi struktural fungsional. Kaum feminis menganggap bahwa perempuan tidak hanya harus berjuang menentang diskriminasi, tetapi juga berjuang demi emansipasi serta pembebasan dari segenap bentuk penindasan oleh pemerintah, oleh masyarakat serta oleh laki-laki (Kamla dan Nighat, 1995:8).

Gerakan feminis lahir untuk memutus budaya patriarki yang ada pada masyarakat. Budaya patriarki menganggap bahwa kekuasaan seorang pemimpin hanya boleh dipegang oleh laki-laki. Perempuan hanya diperbolehkan berperan dalam ranah domestik. Budaya yang sangat kental di masyarakat inilah yang membuat sulitnya wanita untuk dapat masuk ke ranah publik (Irwan Abdullah, 2003:9. *Jurnal Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial*. Vol 15).

Jenis aliran atau gerakan feminis dalam sejarah perkembangannya dikenal cukup banyak yang masing-masing berbeda karakteristiknya. Perbedaan tersebut disebabkan asumsi dasar, pengalaman, dan perspektif paradigmanya dalam memandang persoalan yang menyebabkan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Para kaum feminis sendiri memiliki perbedaan satu sama lain dalam melakukan pembagian dan pengelompokan aliran-aliran feminis yang ada. Jenis aliran feminis tersebut (I Ketut Martana, 2010:1. Jurnal Kajian Teoritis Konstruksi Epistemologi Feminisme. Vol 15) antara lain:

1. Feminisme Liberal

Kaum feminis liberal mendasari gerakannya pada prinsip-prinsip liberal yakni semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama dan setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar dari rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan ini sendiri. Perempuan harus mempersiapkan dirinya untuk bersaing dan tidak bergantung pada laki-laki.

2. Feminisme Radikal

Inti gerakan feminis radikal adalah isu mengenai penindasan perempuan. Kaum feminisme radikal menganggap bahwa penindasan tersebut disebabkan karena adanya penindasan antara lingkup privat dan lingkup

publik, dimana kondisi ini memungkinkan tumbuh suburnya patriarki. Feminisme radikal beranggapan bahwa tubuh dan seksualitas memegang esensi yang sangat penting. Pemahaman bahwa penindasan diawali oleh dominasi atas seksualitas perempuan dalam lingkup privat. Kaum feminisme radikal meneriakkan slogan bahwa “yang pribadi adalah politis”, yang berarti penindasan dalam bentuk privat adalah merupakan penindasan dalam lingkup publik.

3. Feminisme Marxis dan Sosialis

Feminisme marxis dan sosialis menggambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis serta adanya analisis patriarki. Fokusnya adalah kapitalisme dan patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak istimewa. Kaum feminisme marxis dan sosialis berpendapat bahwa penghapusan sistem kapitalis merupakan cara agar perempuan mendapat perlakuan yang sama. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya, sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi.

Feminisme melahirkan gerakan kesetaraan gender yang menuntut kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender salah satunya memperjuangkan kesempatan perempuan untuk dapat hadir dalam ranah publik dan memiliki status sosial. Menurut Mill (dalam Jane dan Helen, 1996:23) wanita harus memiliki kesempatan untuk meraih status melalui

usaha-usaha mereka, yakni suatu hak untuk bersaing. Keharusan melibatkan perempuan dalam ranah publik adalah sesuatu secara ilmiah yang dapat dijelaskan alasannya.

Penelitian-penelitian mengenai keterlibatan perempuan banyak dilakukan diberbagai negara. IPU merupakan salah satu organisasi yang meneliti banyak hal tentang perempuan, termasuk alasan mengapa perempuan harus terlibat dalam ranah publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh IPU (2000) menyebutkan beberapa perbedaan yang terjadi ketika perempuan terlibat di ranah publik :

1. Prioritas dan hasil politik

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memimpin adalah adanya perbedaan pada prioritas yang diambil dan hasil yang dapat. Perempuan akan cenderung meletakkan isu yang baru dan berbeda dalam agenda politik. Isu yang paling sering dan paling mungkin diangkat adalah isu sosial, dengan penekanan pada deskonstruksi kekuasaan dan uang, gaya dan bahasa, proses dan status. Politisi perempuan yang mengidentifikasi tema kesadaran, kepedulian dan sensitifitas sosial ini menunjukkan bahwa politisi perempuan hampir bisa dipastikan berperan sebagai pembela dari segala sektor sosial bukan hanya fokus pada status perempuan.

Hasil survey juga menyatakan bahwa selain perbedaan agenda yang menjadi prioritas, perempuan juga dipercaya dapat membuat perbedaan khusus untuk aspek sosial, ekonomi dan lingkungan pemerintahan.

Responden setuju bahwa prioritas yang dipilih oleh perempuan adalah tindakan yang nantinya akan bermanfaat untuk masa depan. Prioritas tersebut meliputi: pembangunan berkelanjutan, kebijakan yang berpusat pada manusia, menangani kemiskinan, menghapuskan pengangguran, pendidikan, undang-undang untuk keluarga, kesehatan, melawan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat, pembangunan teknologi, isu lingkungan, membela hak minoritas, mempromosikan hak asasi manusia kepada khalayak umum.

2. Merubah proses politik

Keikutsertaan wanita dalam ranah publik dapat memperkaya dan memperluas proses politik yang dimana perempuan membawa keterampilan, gaya dan visi yang baru. Kemampuan perempuan dalam mengintegrasikan kualitas pengelolaan ekonomi dan sosial dalam proses pembuatan keputusan tidak selalu diakui dan dimanfaatkan secara politis, karena di banyak negara banyak praktik-praktik tradisional yang membatasi peran wanita untuk mengatasi berbagai macam masalah publik, termasuk dalam masalah ekonomi makro dan keuangan. Menerapkan prioritas wanita pada pembuatan keputusan di publik akan mendukung kesadaran yang diperlukan untuk merubah sikap tentang peran tradisional.

3. Perilaku dan praktik politik

Perempuan memiliki kecenderungan rendah dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya seperti yang sering dilakukan oleh laki-laki. Isu yang cenderung dipilih oleh laki-laki juga berbeda dengan wanita. Perbedaan kebiasaan dan pemilihan isu inilah

yang akan menghasilkan tindakan yang lebih bertanggungjawab dan lebih menghargai martabat orang lain, acuan yang lebih baik pada isu sosial dan kesejahteraan seluruh keluarga, sehingga adanya komitmen yang lebih baik untuk melawan kemiskinan. Keikutsertaan perempuan membawa kualitas yang berbeda pada proses pembuatan keputusan yang dimana kualitas tersebut dapat membawa perubahan pada budaya politik.

4. Memperluas dan memperkaya proses politik

Penyelesaian masalah publik membutuhkan banyak pertimbangan pada berbagai aspek, hal inilah yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan dalam menyelesaikan masalah publik melihat semua aspek dari permasalahan yaitu politik, ekonomi, dan khususnya aspek sosial dan aspek domestik. Partisipasi perempuan dalam proses demokrasi akan menghasilkan toleransi yang lebih baik dalam masyarakat dan mempengaruhi pikiran banyak orang. Perbedaan pengalaman hidup yang dimiliki oleh perempuan membuat mereka dapat efektif berpartisipasi dalam proses politik.

5. Politik akan lebih responsif pada kebutuhan banyak orang

Kerjasama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam politik maupun masyarakat secara luas akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Kebijakan yang dibuat dari hasil keputusan dan implementasi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara bersama-sama akan menghasilkan respon yang baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Politik dengan demikian akan lebih dekat kepada masyarakat dan akan

mengubah pula cara pandang terhadap politik. Pandangan perempuan dan laki-laki sering kali berbeda. Kontribusi yang diberikan perempuan lebih tertuju hal-hal yang penting dan harus dipikirkan juga kualitasnya, seperti kemampuan komunikasi, bekerja dalam kelompok, dan lain-lain.

Perempuan memiliki pandangan yang lebih manusiawi terhadap isu-isu pembangunan. Perempuan tidak lupa memperhitungkan keadaan kelompok-kelompok yang rentan, termasuk perempuan. Daya peka yang dimiliki oleh perempuan akan membantu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialami oleh laki-laki. Negara-negara yang dimana perempuannya diberi kesempatan untuk terjun ke ranah publik dan ada dalam jabatan politik yang tinggi pasti akan membuat kesetaraan untuk masyarakat pada akses pendidikan. Kesetaraan pendidikan inilah yang merupakan kunci dari kesetaraan dalam bidang apapun.

6. Respon yang lebih baik pada kebutuhan perempuan

Keterwakilan perempuan dalam ranah publik akan mewakili kebutuhan perempuan. Masuknya sejumlah besar perempuan ke dalam ranah publik dapat merubah situasi yang ada. Semakin banyak perempuan dalam ranah publik, itu pasti akan berpengaruh pada isu-isu kebijakan. Pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan berbagai macam orang menuntut perempuan untuk meninjau lebih dekat kebutuhan khusus wanita di semua lapisan masyarakat. Pengalaman dan pekerjaan yang pernah dilakukan membuat perempuan secara khusus dipersiapkan untuk dapat membantu menawarkan respon politik yang sesuai dengan kebutuhan perempuan.

7. Menuju ke arah kesetaraan gender

Sehubungan dengan hak asasi manusia, perempuan memiliki kontribusi spesifik dalam pembuatan kebijakan atau program yang fokusnya khusus pada hak-hak perempuan dan hak asasi manusia. Perkembangan isu pembangunan, seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi perempuan dan anak perempuan adalah bidang yang menjadi perhatian khusus bagi perempuan. Pencantuman perspektif perempuan dalam penyelesaian masalah politik menjadi tahap yang sangat penting untuk dapat menuju kesetaraan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman unik dan sudut pandangan yang dimiliki oleh perempuan dapat meningkatkan dan mengubah definisi dari masalah dan solusi.

8. Demokrasi, transparansi dan kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Terlibatnya perempuan dalam ranah publik akan menciptakan demokrasi yang lebih baik, peningkatan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah publik membawa kredibilitas dan membuat demokrasi lebih mudah di akses karena pendekatan mereka yang lebih lemah lembut terhadap masalah. Partisipasi perempuan sangat perlukan dalam hal ini. Representasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki akan dapat membuat pengelolaan pemerintahan menjadi lebih baik

Mereka cenderung membawa visi keibuan pada hubungan sosialnya. Aspek makro dan mikro dalam ekonomi, manajemen dan tatakelola

pemerintahan adalah lingkup yang penting dimana kontribusi perempuan sangat berharga bagi proses demokrasi. Seperti halnya dengan menjadi ibu, istri dan guru kontribusi spesifik dalam proses demokrasi perempuan akan terlihat pada tingkat manajemen masyarakat, baik moral maupun material misalnya: pemerintahan yang baik dan pengenalan mekanisme yang mengarah ke perdamaian, non-kekerasan pada penduduk, serta budaya toleransi dan menghormati orang lain.

9. Pendekatan perdamaian manusia untuk politik

Perempuan yang terlibat secara politik, ada kemungkinan lebih untuk berkompromi dan menyelesaikan sengketa atau hal-hal yang kontroversial. Perempuan akan cenderung mengurangi permusuhan dan lebih menekankan pada permufakatan, mereka lebih suka mencari solusi dari pada memecat poin politik. Gaya yang digunakan oleh perempuan membawa pendekatan yang lebih konsultatif dan berbasis konsensus untuk pemecahan masalah, inilah mengapa perempuan sering dibawa saat mediasi berlangsung.

10. Kepercayaan diri dalam politik dari masyarakat

Banyaknya partisipasi perempuan dalam kehidupan politik akan mengarahkan kepercayaan dalam politik, demokrasi serta kesetaraan gender ke tingkat yang lebih tinggi. Masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam proses konsultasi (perundingan) ketika politisi perempuan terlibat di dalamnya. Keterlibatan perempuan dalam ranah publik dapat memicu terciptanya prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam *local management*. Keikutsertaan perempuan dapat membawa sebuah negara

menjadi negara yang demokratis yang menjunjung tinggi perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Partisipasi pada sisi lain dari pembangunan akan meningkat.

11. Perkembangan dalam politik dan bahasa dalam parlemen

Bahasa yang digunakan oleh perempuan secara mendasar berbeda dengan laki-laki. Rasa empati, mufakat, akomodasi, penghormatan, perdamaian, keanekaragaman merupakan bingkai bahasa yang sering digunakan oleh pemimpin atau pembicara perempuan. Kehadiran perempuan dalam parlemen biasanya membuat perbedaan pada kebiasaan laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam parlemen membuat laki-laki berbicara lebih hati-hati dan lebih sopan.

12. Perempuan tentang kemungkinan masa depan kesetaraan gender dalam politik

Partisipasi perempuan pada tingkat kepemimpinan adalah fitur penting dari kesetaraan gender dan demokrasi. Keikutsertaan perempuan dalam ranah publik akan memberikan dampak positif kepada masyarakat karena perempuan memiliki kecenderungan lebih baik daripada laki-laki dalam merealisasikan aspirasi masyarakat. Proporsi perempuan yang lebih besar dalam ranah publik membuat keputusan yang diambil akan lebih dekat dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Politik akan menuju taraf yang lebih baik jika dibentuk dan dipimpin oleh perempuan.

B. Konsep kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur yang sangat fundamental dari sebuah organisasi yang urgensinya tidak diragukan lagi. Segala aspek dan dinamika yang ada dalam organisasi menjadikan pentingnya kepemimpinan untuk dapat membawa sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan ini akan membawa organisasi pada pencapaian yang harus diperoleh suatu organisasi. Sebab inilah yang menjadikan suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang dapat bekerja secara efektif.

Pada perjalanan awalnya, konsep tentang pemimpin dan kepemimpinan muncul bersama-sama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman nabi-nabi dan nenek moyang manusia berkumpul bersama, lalu bekerja sama untuk mempertahankan eksistensinya pada saat itu. Sejak itu terjadi kerjasama antar manusia, dan ada unsur kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki setiap pemimpin. Kaloh (2009:5) mengatakan bahwa kepemimpinan bisa menjadi faktor penentu kesejahteraan sebuah masyarakat.

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” (dalam Bahasa Inggris “*lead*”) berarti bimbingan atau tuntutan, dimana ada yang dipimpin, maupun memimpin. Kepemimpinan menurut Cooley (1902) dapat diartikan sebagai kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan

pusat proses kelompok. Pigors (1935) mengartikan kepemimpinan sebagai suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan-perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama (Inu Kencana, 2006:2)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses konsisten yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya. Proses tersebut dilakukan dengan memobilisasi segala aspek sumber daya yang melibatkan dan mempengaruhi motivasi pengikutnya demi mencapai tujuan suatu organisasi. Kepemimpinan menjadi alat bagi seorang pemimpin untuk bisa mengarahkan pengikutnya untuk melakukan sesuatu yang diinginkan.

C. Gaya Kepemimpinan

Menghadapi reformasi birokrasi tentu memberikan banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi pemimpin. Tantangan pemimpin era globalisasi mendatang akan semakin kompleks dan berat apabila Pancasila dan Undang-Undang 1945 tidak dijadikan sebagai faktor konstanta bangsa (Nazaruddin Syamsuddin dkk, 1993:224). Studi tentang kepemimpinan terus berkembang untuk bisa menghasilkan gaya kepemimpinan yang efektif bagi organisasi. Pemimpin dihadapkan pada situasi yang terus berubah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan.

Pemimpin harus memiliki kemampuan transformatif untuk dapat mentransfer perubahan yang terjadi untuk kepentingan. Berkaitan dengan hal ini, James Mc. Gregor (Sedarmayanti, 2013:184) menyebutkan dua gaya kepemimpinan yaitu :

1. Kepemimpinan transaksional

Kepemimpinan transaksional adalah model kepemimpinan dimana seorang pemimpin cenderung memberi arahan kepada bawahan, serta memberi imbalan dan hukuman atas kinerja serta menitikberatkan pada perilaku untuk memandu pengikut ke arah tujuan yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. James menyebutkan ada tiga dimensi perilaku pada gaya kepemimpinan transaksional yaitu :

a. *Contingent reward* (penghargaan rombongan)

Pemimpin pada dimensi ini, untuk mempengaruhi perilaku, mereka memperjelas pekerjaan yang dilakukan menggunakan insentif sebagai alat mendorong pencapaian hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan harapan.

b. *Management by exception* (manajemen dengan pengecualian)

Management by expectation membagi dua kategori dalam mempengaruhi perilaku. Pertama, secara pasif untuk mempengaruhi perilaku, pemimpin menggunakan upaya koreksi atau hukuman sebagai respon terhadap kinerja buruk atau menyimpang terhadap standar. Kedua, secara aktif untuk mempengaruhi perilaku, pemimpin secara aktif melakukan pemantauan terhadap kerja yang dilakukan

pegawai dan menggunakan upaya korektif dalam rangka memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dan diselesaikan sesuai standar.

c. *Laissez-faire leadership* (kepemimpinan *laissez faire*)

Pemimpin ini menghindari upaya mempengaruhi bawahan, melalaikan tugas pembinaan sebagai pemimpin, menenggelamkan diri pada pekerjaan rutin dan menghindari konfrontasi. Pemimpin banyak memberikan tanggungjawab kepada bawahan, tidak menetapkan tujuan jelas, tidak membantu pengambilan keputusan kelompok, membiarkan semua mengalir selama semua terlihat aman.

2. Kepemimpinan transformasional

Kepemimpinan transformasional meliputi tidak hanya organisasi atau kelompok tapi juga pada orang dimana kepemimpinan itu terjadi. Kepemimpinan ini merupakan model dimana seorang pemimpin cenderung memberi motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih baik dengan menitikberatkan pada perilaku membantu transformasi antar individu dengan organisasi. Menurut Burn (dalam Triantoro Safaria, 2004) teori kepemimpinan transformasional dicirikan sebagai pemimpin yang berfokus pada pencapaian perubahan nilai-nilai, kepercayaan, sikap, perilaku, emosional, dan kebutuhan bawahan menuju perubahan yang lebih baik. Dimensi gaya kepemimpinan transformasional meliputi:

a. *Charisma atau idealized influence* (pengaruh ideal)

Pemimpin menunjukkan keyakinan dan daya tarik pada pengikutnya. Pemimpin ini memiliki nilai yang ditunjukkan jelas dalam setiap tindakan

sehingga menjadi contoh bagi pengikutnya. Kepercayaan yang dibangun antara pemimpi dan pegikut didasarkan pada landasan moral dan etika.

b. *Inspirational motivation* (motivasi inspirasi)

Perilaku pemimpin dalam dimensi ini megartikulasi visi yang mendorong dan memberi inspirasi pengikutnya. Pemimpin memberi tantangan kepada pengikut untuk memenuhi standar yang lebih tinggi, mengkomunikasikan optimisme tentang pencapaian tujuan masa depan dan memberi tugas yang berarti.

c. *Intellectual stimulation* (stimulasi intelektual)

Pemimpin pada dimensi ini mau mengambil resiko dan meminta ide pengikutnya, membangkitkan semangat dan mendorong kreativitas pengikutnya. Visi pemimpin menjadi kerangka pikir pengikut untuk menghubungkannya dengan pimpinan, organisasi dan sesama mereka. Pemimpin transformasional menciptakan rangsangan berpikir inovatif bagi pengikut melalui asumsi pertanyaan, merancang kembali masalah, melakukan pendekatan pada situasi lampau melalui cara baru.

d. *Individual consideration or individual attention* (pertimbangan individu)

Pemimpin transformasional selalu hadir ketika pengikut membutuhkan. Pimpinan ini bertindak sebagai mentor, mendengarkan apa yang menjadi perhatian dan kebutuhan pengikut, termasuk kebutuhan dihormati dan menghargai kontribus individual terhadap organisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, diskursus pemikiran James menunjukkan bahwa untuk menjawab tantangan organisasi, kepemimpinan memiliki dua gaya kepemimpinan yang efektif. Pertama, kepemimpinan dengan gaya transaksional dimana gaya kepemimpinan ini cenderung menghasilkan kepatuhan pengikut akan perintah pemimpin. Kedua, kepemimpinan dengan gaya transformasional dimana pemimpin memberikan bantuan dan motivasi terhadap pengikutnya untuk bekerja lebih baik. Gaya ini dapat mendorong pegawai lebih inovatif.

D. Kerangka Pemikiran

Penjelasan teoritis mulai dari konsepsi tentang gender yang disertai juga alasan pentingnya keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan konsepsi kepemimpinan pemerintah yang merujuk pada beberapa teori dan konsep tentang kepemimpinan pemerintahan telah dijelaskan secara rinci pada sub bab sebelumnya. Penjabaran teoritis pada sub bab sebelumnya dimaksudkan agar konsep dan teori tersebut dapat menjadi landasan teori dalam meneliti bagaimana refleksi gender dan kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur. Peneliti dalam sub bab ini akan memaparkan alur pikir peneliti dalam bentuk kerangka pikir menggunakan beberapa teori-teori yang dianggap peneliti relevan dalam konteks penelitian ini.

Kepemimpinan kepala daerah perempuan di Kabupaten Lampung Timur merupakan fokus dalam penelitian ini. Kepemimpinan kepala daerah menjadi

sesuatu yang sangat penting mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan di daerah. Kepala daerah juga sebagai pemimpin organisasi pemerintahan di daerah dihadapkan pada situasi-situasi yang terus berubah dan dituntut untuk dapat beradaptasi pada perubahan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa kepala daerah harus bisa mempraktekkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam menjawab tantangan organisasi dan melakukan perubahan serta perbaikan pada setiap aspek pembangunan.

Penelitian mengenai makna kepemimpinan dalam penelitian ini menggunakan konsepsi dari IPU yaitu tentang “*women’s vision of how their involvement in politics makes a difference*”. Peneliti menggunakan konsep tersebut karena konsep tentang pengaruh keterlibatan perempuan di ranah publik adalah konsep yang relevan untuk dapat meneliti bagaimana refleksi gender dalam kepemimpinan pemerintahan dalam kontes penelitian ini. Mengingat pentingnya keterlibatan perempuan dalam ranah publik untuk dapat membuat perubahan pada proses dan prosedur politik era sekarang (*Inter-Parlementary Union: 2000:30*).

Peneliti menggunakan konsep gender yang disuguhkan oleh IPU yaitu tentang “*women’s vision of how their involvement in politics makes a difference*” mengacu pada hasil-hasil keterlibatan perempuan yang kemudian menjadi alasan-alasan penting mengapa perempuan harus terlibat dalam ranah publik. IPU mengidentifikasi 12 indikator perubahan sebagai hasil dari

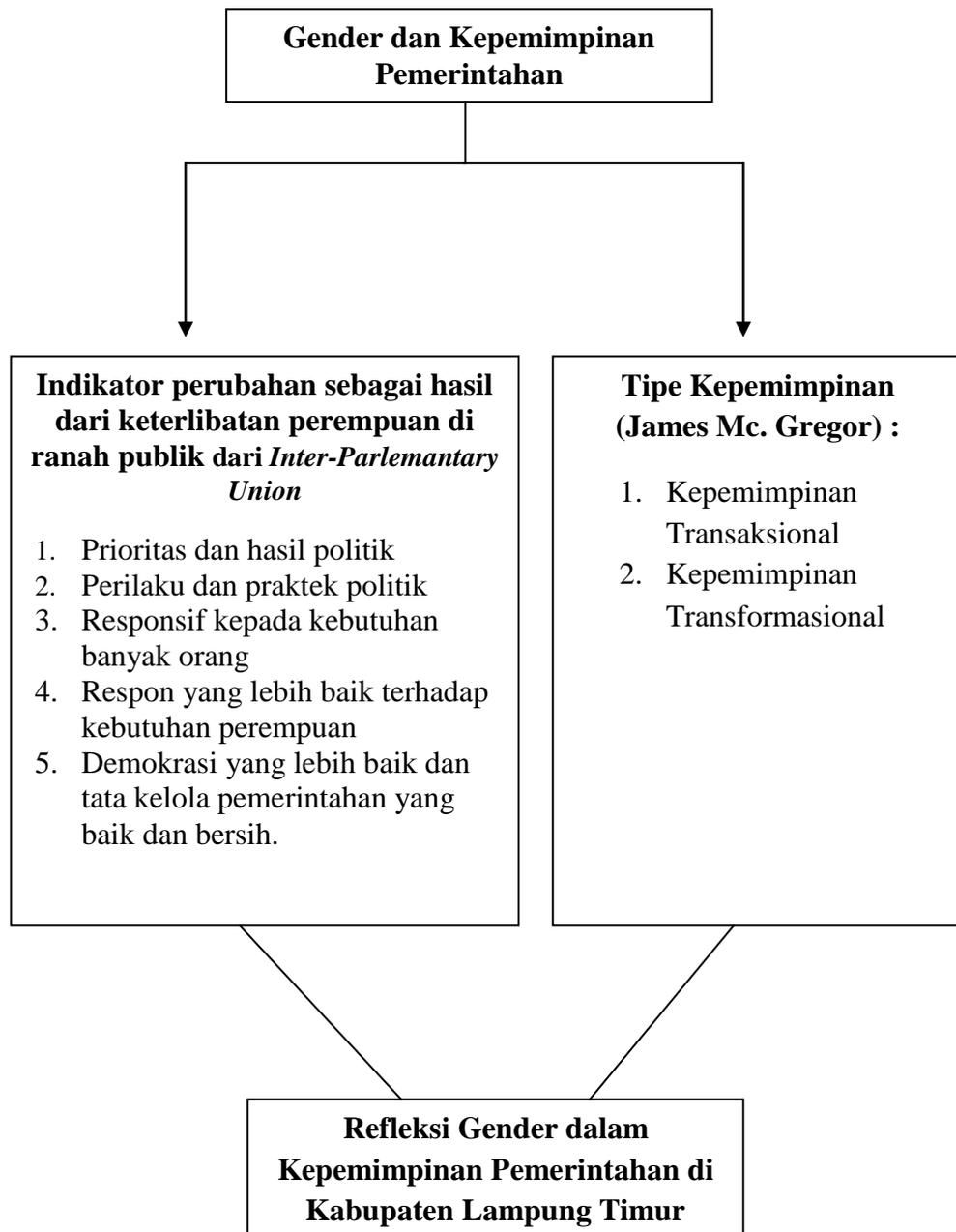
keterlibatan perempuan di ranah publik yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya akan menggunakan lima indikator yang dijadikan sebagai indikator untuk menganalisis bagaimana refleksi gender dalam kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur.

Perubahan-perubahan tersebut meliputi, pertama, pada prioritas dan hasil politik. Kedua, pada perilaku dan praktek politik. Ketiga, responsif terhadap kebutuhan perempuan. Keempat, responsif kepada kebutuhan banyak orang. Kelima, demokrasi yang lebih baik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pemilihan kelima indikator tersebut didasarkan pada kesesuaian indikator-indikator tersebut dengan ruang lingkup penelitian ini.

Peneliti menganalisis model gaya kepemimpinan kepala daerah perempuan dengan menekankan pada pemikiran James Mc. Gregor yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transaksional meletakkan pemimpin sebagai seorang yang cenderung memberi arahan serta memberi imbalan dan hukuman atas kinerja mereka serta menitikberatkan pada perilaku untuk memandu pengikut ke arah tujuan yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Gaya kepemimpinan transformasional meletakkan pemimpin sebagai seorang yang memberi motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih baik serta menitikberatkan pada perilaku membantu transformasi antara individu dengan organisasi.

Tantangan dan perubahan organisasi membuat pemimpin harus bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat. Pemimpin dihadapkan pada situasi yang terus berubah yang menuntut seorang pemimpin harus memiliki kemampuan transformasi, dan dapat menangani perubahan tersebut. Kemampuan itulah yang menjadi kunci keberhasilan perubahan yang dilaksanakan melalui reformasi birokrasi (Sedarmayanti:2009:184).

Melalui deskripsi ilmiah pada tinjauan teoritik tersebut, peneliti akan menggambarkan skema alur pikir penelitian pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pikir Refleksi Gender dan Kepemimpinan Pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mendeskripsikan fenomena secara akurat dan terperinci. Metode penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa yang berkaitan dengan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu berdasarkan perspektif penulis (Husain dan Purnomo, 2009:78). Alasan memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu: pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual yang berangkat dari masalah yang sifatnya holistik, kompleks dan dinamis yang tidak bisa diteliti dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau kuantifikasi.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, artinya penelitian difokuskan pada fenomena yang dipilih dan kemudian dipahami secara mendalam. Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci terhadap suatu organisasi atau fenomena tertentu. Berdasarkan kajian peneliti bahwa gender dan kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur

memerlukan pemahaman seperti apa refleksi gender dan kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana refleksi gender dan kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten dengan studi pada kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim tahun 2016. Peneliti menganalisis bagaimana refleksi gender dengan menitikberkan pada konsep dari IPU yaitu tentang “ *women’s vision of how their involvement in politics makes a difference*” mengacu pada hasil-hasil keterlibatan perempuan dalam ranah publik. IPU mengidentifikasi 12 indikator perubahan sebagai hasil dari keterlibatan perempuan di ranah publik yang peneliti batasi menjadi beberapa indikator perubahan yang peneliti anggap sesuai dengan konteks penelitian ini yaitu:

1. Prioritas dan hasil politik

Isu sosial menjadi agenda prioritas perempuan dan dampak optimal dari prioritas perempuan tersebut.

2. Perilaku dan praktik politik

Kecenderungan perempuan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk dirinya maupun keluarga dalam menunjuk pejabat pemerintahan.

3. Responsif kepada kebutuhan banyak orang

Responsivitas perempuan terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.

4. Respon yang lebih baik pada kebutuhan perempuan

- a. Dibuatnya program untuk merespon isu-isu terkait perempuan.
 - b. Kebijakan dan program yang dibuat dapat menghimpun seluruh kebutuhan perempuan.
5. Demokrasi yang lebih baik, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- a. Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
 - b. Kepemimpinan perempuan menunjang instansi pemerintahan daerah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*.

Penelitian ini menganalisis gaya kepemimpinan Chusnunia dengan menitikberatkan pada pemikiran James Mc. Gregor yaitu terdapat dua tipe kepemimpinan yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Peneliti menganalisa gaya kepemimpinan Chusnunia Chalim dengan menggunakan tujuh indikator perbandingan berdasarkan karakteristik dari dua tipe kepemimpinan tersebut. Ketujuh indikator dijabarkan menurut masing-masing tipe kepemimpinan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan transaksional
 - a. Artikulasi visi
 - Visi disampaikan berdasarkan standar birokrasi dan organisasi
 - Memperjelas peran dan tuntutan tugas pegawai

- b. Relasi dengan pengikut
 - Responsif terhadap kebutuhan pegawai selama kebutuhan tersebut sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai
 - Mengabaikan tugas pembinaan sebagai pimpinan
 - c. Motivasi pengikut
 - Menggunakan insentif sebagai alat pendorong pencapaian hasil tugas yang sesuai harapan
 - d. *Output* pengikut
 - Tidak menghasilkan loyalitas pegawai karena motivasi hanya didasarkan pada *reward* dan *punishment*
 - Pegawai tidak dapat bekerja melampaui tugas yang diberikan
 - e. Proses pemecahan masalah
 - Mengabaikan pemecahan masalah
 - Tidak membantu pengambilan keputusan kelompok
2. Kepemimpinan transformasional
- a. Artikulasi visi
 - Visi disampaikan dengan jelas
 - Memberikan tantangan untuk pencapaian visi
 - b. Relasi dengan pengikut
 - Mendengarkan dan memenuhi kebutuhan pegawai yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah

- Mendelegasikan kewenangan kepada pegawai untuk mencapai visi
- c. Motivasi pengikut
 - Membangkitkan semangat dengan motivasi
 - Mendorong pegawai untuk berinovasi dan bekerja keras
- d. *Ouput* pengikut
 - Memiliki rasa kagum dan hormat kepada pemimpin
 - Selalu termotivasi untuk meningkatkan kinerja
- e. Proses pemecahan masalah
 - Memiliki andil dalam pengambilan keputusan

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dan waktu penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang diambil akan membantu peneliti untuk memahami masalah penelitian. Adapun waktu pada penelitian ini, yakni pada bulan November 2016 hingga April 2017. Menurut Herdiansyah (2012:56) memaparkan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan sasaran dalam proses pengambilan data. Lokasi Penelitian didasarkan pada masalah yang terjadi di lapangan. Lokasi terkait penelitian ini adalah pada Kabupaten Lampung Timur.

D. Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan ditentukan melalui sebuah teknik penentuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik *stratifikasi sampling* dalam menentukan informan. *Stratifikasi sampling* adalah teknik penentuan informan berdasarkan strata atau hirarki pada masyarakat yang heterogen. Alasan menggunakan teknik ini dikarenakan informan berupa birokrasi yang memiliki strata berbeda-beda, kemudian peneliti juga menitikberatkan pada informasi masyarakat terkait dampak dari refleksi gender dalam kepemimpinan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Sekretariat Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Timur. Alasan peneliti memfokuskan penelitian pada Sekretariat Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Timur adalah lingkup kerjanya paling dekat dengan kepala daerah Kabupaten Lampung Timur. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah dan seluruh kepala bagian di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Peneliti juga memfokuskan penelitian pada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait gender dalam kepemimpinan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

E. Jenis Data

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan penelitian. Sumber data merupakan *natural setting* dalam memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain.

Menurut Sugiyono (2012:225) sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berasal dari informan dengan tujuan memberikan data yang akurat kepada peneliti. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data yaitu:

1. Data Primer

Peneliti menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara, baik terstruktur maupun mendalam, serta obeservasi langsung oleh peneliti. Peneliti menentukan informan penelitian menggunakan teknik *stratifikasi sampling* dalam pengambilan sampel sumber data. Data primer pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung

Timur sebagai SKPD yang lingkup kerjanya paling dekat dengan kepala daerah Kabupaten Lampung Timur dan juga tokoh masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen berupa Undang-undang, pemberitaan media cetak. Dokumen tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal Irwan Abdullah Tahun 2003 tentang Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, Kompas dan Tribun Lampung. Pemberitaan media online antara lain: kpu.go.id, unwomen.org, UNDP, www.harianpilar.com, lampung.tribunnews.com, website resmi Kabupaten Lampung Timur dan suryaandalas.com.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti telah menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara peneliti dengan informan yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Nazir, 2011:193). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian. Proses

wawancara dilakukan dengan wawancara secara terstruktur, yaitu peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, sehingga proses wawancara tidak menyimpang dari fokus penelitian.

Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait permasalahan penelitian. Informan yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini adalah, Sekretaris daerah Kabupaten Lampung Timur dan seluruh kepala bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Berikut Informan yang peneliti wawancarai:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Puji Riyanto	Sekretaris Daerah
2	Mohammad Ridwan, S.H	Kepala Bagian Otonomi Daerah
3	Sudarli, S.H.	Kepala Bagian Hukum
4	M. Ali Nurfiyah, S.Sos	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
5	Agus Firmansyah Luman, S.E.	Kepala Bagian Bina Mental
6	Mujianto, S.IP	Kepala Bagian Perekonomian
7	Drs. Mirwansyah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
8	Drs. Maryono	Kepala Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
9	Drs. Ali Rasyid, M.M	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
10	Mart Aziz, S.P, M.M	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga

11	Sukartono, S.Sos, M.M	Kepala Bagian Keuangan
12	Joko Priono, BA	Kepala Bagian Organisasi
13	Triwibowo, STP, M.M	Kepala Bagian Protokol
14	Mursalin, S.Pd	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia
15	Iman Zudi Adnan	Ketua PCNU Kabupaten Lampung Timur
16	Hj. Nanik Hermin Astuti, A.Md	Tokoh Perempuan Kabupaten Lampung Timur
17	Budi Suhermanto	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Timur
18	Tranmiyati	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Lampung Timur

Sumber: diolah oleh peneliti pada 31 Mei 2017

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan. Studi dokumentasi yaitu dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber data tertulis sebagai penguat data yang diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data melalui dokumen, gambar, sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara.

Sumber data tertulis pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2016. Sumber data tertulis berupa Jurnal *Perempuan dan Korupsi pada Ranah Publik* oleh Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhana pada tahun 2013, Jurnal *Kepemimpinan Kepala*

Sekolah Perempuan dalam Mengembangkan Hidden Curriculum oleh Suwaidan pada tahun 2015, *Andhi Jurnal Isu Gender dalam Ranah Publik dan Domestik* oleh Herfidha Attas, *Jurnal Keterwakilan Perempuan dalam Kancah Politik* oleh Fajar Apriani pada tahun 2015, *Jurnal Persepsi Gaya Kepemimpinan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya* Tahun 2013 oleh Dina Fariza Triyani Syarif, *Jurnal Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional terhadap kinerja karyawan* oleh Jacqueline Lomanjaya tahun 2014, *Jurnal Transformational and Transactional Leadership*, Timoty A. Judge dan Ronald F. Picolo tahun 2004, *Jurnal Karakteristik Kepemimpinan Transformasional* tahun 2015 oleh Shalahuddin, bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah* tahun 2015 oleh Andriansyah,

Sumber data penelitian juga berasal dari koran dan media online yang berkaitan dengan pemberitaan terkait hasil pilkada 2015 dan program-program kerja baru dari Bupati perempuan di Kabupaten Lampung Timur.

G. Teknik Pengolahan Data

Proses selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing data*

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. *Editing* bertujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran

dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna dianalisis berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi.

H. Teknik Analisis Data

Data harus bermakna jika ditafsirkan atau dianalisis pada konteksnya, oleh karena itu data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi perlu dianalisis secara akurat dan seksama. Menurut Miles dan Huberman (dalam Morissan, 2012: 27) Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

Peneliti mengumpulkan data mengenai gender dan kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur. Peneliti mewawancarai informan yaitu Sekretaris Daerah, seluruh kepala bagian di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dan tokoh masyarakat Kabupaten Lampung Timur menggunakan pertanyaan yang sama

untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Display data*

Display data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada *display data* ialah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi data

Verifikasi Merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan

yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.

Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses *display data*. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang *valid*. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang

sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Kabupaten Lampung Timur diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan di Kota Sukadana. Kabupaten Lampung Timur pada awal berdiri meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten

Kecamatan di Wilayah Kabupaten tersebut meliputi Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Provinsi Tingkat I Lampung, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu Kecamatan Marga Tiga dan Sekampung Udik ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan definitif. Hal tersebut membuta wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor

13 Tahun 2001 maka jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif dan 232 desa.

Perkembangan selanjutnya, dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2001 dan Nomor 06 Tahun 2002, jumlah desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 232 desa definitif dan 3 desa persiapan. Pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 Desa di Kabupaten Lampung Timur, saat ini Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan definitif dan 264 desa.

B. Kondisi Geografis dan Administratif

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang secara geografis terletak pada posisi 105°15' BT - 106°20' BT dan 4°37' LS - 5°37' LS, dengan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Dari segi topografi Kabupaten Lampung Timur dapat dibagi menjadi lima daerah yaitu:

1. Daerah berbukit sampai bergunung, terdapat di Kecamatan Jabung Sukadana, Sekampung Udik dan Labuhan Maringgai.
2. Daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, dengan kemiringan antara 8 % hingga 15 % dan ketinggian antara 50 meter sampai 200 meter dpl.
3. Daerah dataran alluvial, mencakup kawasan yang cukup luas meliputi kawasan pantai pada bagian timur Kabupaten Lampung Timur dan daerah-daerah pada sepanjang sungai juga merupakan sebagian hilir dari Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian kawasan tersebut berkisar antara 25 hingga 75 meter dpl dengan kemiringan 0 % hingga 3 %.
4. Daerah rawa pasang surut di sepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0,5 hingga 1 meter dpl.
5. Daerah aliran sungai, yaitu Seputih, Sekampung dan Way Jeparu.

Secara administratif wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

1. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur yang terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa, di antaranya : Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Batang hari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan mataram Baru, Kecamatan Bandar Sribawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Gunggung Pelindung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Labuhan Retu, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Purbolinggo dan Kecamatan Way Bungur (BPS dan Bappeda Provinsi Lampung,
2. Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sepanjang 4 mil laut dari garis pantai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Hukum Laut.
3. Wilayah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya milik bersama (*common resources*),

yang berdasarkan sifat fisik alamiahnya tidak mengenal batas, serta aset negara bernilai ekonomis dan sosial yang terkait erat dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Jika terjadi pembagian atau pemilahan penguasaan terhadap ruang udara, maka dapat terjadi konflik kepentingan bersama (*tragedy of common*) terhadap ruang udara, yang pada akhirnya berdampak kepada keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika dilihat dari sisi pemerintahan, sejak berdirinya Kabupaten Lampung Timur Tahun 1999 sampai dengan sekarang, telah dijabat oleh 6 (enam) Bupati yaitu :

1. H. Muhammad Nurdin, S.H. : Periode April 1999 s/d April 2000
2. Ir. H. Irfan N. Djafar, CES : Periode April 2000 sd Desember 2002
3. H. Bahusin MS : Periode Desember 2002 s/d Mei 2005
4. H. Syaiful Anwar HAM, S.H. : Periode Mei 2005 s/d Agustus 2005
5. H. Satono, S.H., S.P. : Periode Oktober 2005 s/d Mei 2011
6. Erwin Arifin, S.H., M.H. : Periode Mei 2011
7. Chusnunia Chalim : : Periode Februari 2016 s/d sekarang

C. Kependudukan

Salah satu ciri pokok penduduk di negara berkembang seperti Indonesia, selain jumlahnya besar, secara geografis penyebarannya tidak merata. Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sekitar 15% dari total

wilayah Provinsi Lampung memiliki ciri yang sama. Persebaran penduduk yang tidak merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek kultur, historis, dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Persebaran penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke agroindustri. Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik.

Merujuk pada data Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 adalah 1.018.420 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 520.810 jiwa dan perempuan sebanyak 497.61 jiwa, dengan *sex ratio* 105,55. Lampung Timur dengan luas wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sekitar 532.503 hektar atau 5.325,03 km², dan didiami oleh 1.018.420 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Timur adalah sebanyak 189 jiwa per kilometer persegi. kecamatan dengan populasi penduduk terpadat adalah Kecamatan Pekalongan, yaitu sebanyak 486 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Way Bungur yaitu sebanyak 63 jiwa per kilometer persegi.

Jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan maka jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Sekampung Udik dengan jumlah penduduk 72.197 jiwa dan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Bumi Agung dengan jumlah penduduk 17.785 jiwa.

D. Pembangunan manusia

Pembangunan manusia merupakan sebuah kebutuhan yang harus dikembangkan untuk peningkatan kualitas manusia yang lebih baik. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek pendidikan yang baik, kualitas kesehatan yang optimal dan ekonomi yang berkembang akan menjadikan manusia unggul.

Angka indeks pembangunan manusia Lampung Timur hanya mengalami sedikit peningkatan dari 66,42 pada tahun 2015 menjadi 67,10 di tahun 2016. Lambatnya kenaikan angka indeks pembangunan manusia ini dapat dipahami, mengingat dampak dari investasi di bidang kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun indeks pembangunan manusia (sumber: lampungtimurkab.bps.go.id, diakses pada tanggal 28 Maret 2017, pukul: 12.52 WIB)

E. Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2015 ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Lampung Timur tahun 2015 sebesar 5,24 persen, melambat 23 basis poin dari pertumbuhan tahun 2014 yang mampu tumbuh sebesar 5,47 persen. Lesunya perekonomian Lampung Timur di tahun 2015

tidak luput akan dampak dari melesunya pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

a. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2016 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 39,2 persen. Golongan tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 40,16 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Meskipun mengalami penurunan kontribusi, namun pertumbuhan golongan ini meningkat dari 1,92 persen pada tahun 2015 menjadi 3,67 persen pada tahun 2016.

- b. Kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hampir seluruhnya disumbangkan oleh subkategori Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi. Sebesar 26,96 persen kontribusi subkategori ini pada total perekonomian Lampung Timur tahun 2015, menurun dari 28,88 persen di tahun 2011. Tahun 2015, kategori pertambangan dan penggalian menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 3,04 persen. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh negatif 3 persen. (<https://lampungtimurkab.bps.go.id>)

F. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Sesuai dengan dasar hukum pembentukan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur tersebut, organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 16 dinas dan 17 lembaga teknis daerah (badan/kantor/rumah sakit umum daerah). Penelitian ini memfokuskan pada birokrasi dilingkup Sekretariat Pemerintah daerah kabupaen lampung timur. Berikut ini adalah gambaran umum terkait Sekretariat Pemerintah daerah kabupaen lampung timur:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati yang dipimpin oleh seorang sekertaris daerah. Sekertariat daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan adminisitratif. Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur terletak di JL. Sukadana Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Bumi Nabung Udik Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Berikut ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur berjumlah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 80 Staff dan berikut adalah daftar struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur:

Tabel 4. Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Lampung

Timur

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Puji Riyanto	Sekretaris Daerah
2	Drs. Tarmizi	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Junaidi, SE,MM.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
4	Wan Ruslan Abdul Ghani, SE, M.Si.	Asisten Bidang Administrasi Umum
5	Mohammad Ridwan, S.H	Kepala Bagian Otonomi Daerah
6	Sudarli, S.H.	Kepala Bagian Hukum
7	M. Ali Nurfiyah, S.Sos	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
8	Agus Firmansyah Luman, S.E.	Kepala Bagian Bina Mental
9	Mujianto, S.IP	Kepala Bagian Perekonomian
10	Drs. Mirwansyah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
11	Drs. Maryono	Kepala Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
12	Drs. Ali Rasyid, M.M	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
13	Mart Aziz, S.P, M.M	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga
14	Sukartono, S.Sos, M.M	Kepala Bagian Keuangan
15	Joko Priono, BA	Kepala Bagian Organisasi
16	Triwibowo, STP, M.M	Kepala Bagian Protokol

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017

G. Gambaran Umum Profil Chusnunia Chalim, Data pemilih Perempuan dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada 2015

Sebelum menjabat Bupati Lampung Timur 2016-2020, Chusnunia adalah anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 periode (2009-2014, 2014-2019). Chusnunia merupakan lulusan IAIN Wali Songo Semarang. Wanita kelahiran Karang Anom. Chusnunia merupakan sosok yang aktif di bidang politik. Dia pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo (2003), Ketua Divisi Eksternal Komite Independen Pemantau pemilu Jawa Tengah (2003-2004), Staf Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah dan masih banyak lagi.

Jenjang pendidikan Chusnunia Chalim dimulai dari SDN 2 Sumber Rejo Lampung Timur (1995), SLTPN 3 Jabung Lampung Timur (1998), SLTA, SMA Negeri Mayong (2001), S1 Syariah, Universitas Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Surakarta (2005), S2 Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta (2011) dan merupakan lulusan S3 Sastra dan Sains Sosial Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Awal karir Chusnunia dimulai dari menjadi Sekretaris Redaksi Jurnal Justisia Semarang pada tahun 2001-2002, lalu sebagai Staf Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD provinsi Jawa Tengah (2005 - 2007), Deputy Office Manager Sekjen DPP PKB (2005-2007), Staf Menteri Tenaga Kerja RI Tahun 2007, Koordinator Zona Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada Tahun 2008 – 2009 dan merupakan anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2015.

Chusnunia Chalim sudah tertarik akan isu-isu politik sejak di bangku kuliah. Berawal dari bekerja menjadi Sekretaris di divisi Redaksi Jurnal Justisia di Surakarta (2001-2002) dan menjadi Kepala Divisi Eksternal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Tengah pada Pileg 2004, minat dan semangat politik Chusnunia semakin terbangun. Pada 2004 Chusnunia bergabung menjadi kader dan juga staf dari PKB di Jawa Tengah. Chusnunia dipercaya menjadi Kepala Administrasi dan Keuangan dari Fraksi PKB di DPRD Provinsi Jawa Tengah (2004-2005). Karena kinerjanya yang baik, Chusnunia diminta untuk menjadi Staf di DPP PKB di Jakarta (2005-2008).

Pada tahun 2007 ketika Bendahara Umum PKB dan juga Wakil Ketua Komisi V DPR-RI periode 2004-2009, Erman Soeparno, ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Indonesia Bersatu, Chusnunia diperbantukan menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan diberikan kepercayaan menjadi Koordinator Zona di Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (2008 - 2009).

Pada Pileg 2009 Chusnunia mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014. Pada internal PKB sendiri Chusnunia semakin mendapat tanggung jawab lebih besar dan di periode 2009-2014 menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB. Pada Pileg 2014 Chusnunia kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada Pilkada Bupati Lampung Timur 2015, Chusnunia berpasangan dengan Syaiful Bukhori mencalonkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati 2015-2020 dan akhirnya terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur.

Pada pilkada 2015, berdasarkan data dari KPU RI, jumlah pemilih perempuan pada pilkada langsung 2015 adalah 392.767 dengan jumlah pengguna hak pilih perempuan adalah sebesar 253.490. Tingkat partisipasi perempuan pada pilkada 2015 adalah sebesar 64,54%.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Gender dan kepemimpinan pemerintahan perempuan cenderung feminis liberal, yang *concern* pada kebijakan responsif gender dan anak
2. Pemilihan pejabat publik diupayakan secara profesional, proporsional, dan meminimalisir nepotisme dalam pemerintahan. Isu-isu terkait perempuan menjadi isu yang diperhitungkan pada kepemimpinan Chusnunia Chalim seperti mulai adanya fasilitas kesehatan untuk perempuan, program untuk pembinaan dan perlindungan untuk TKI, serta program pemberdayaan perempuan.
3. Penerapan demokrasi melalui pelibatan perempuan dalam jabatan strategis dan proses pengambilan keputusan, serta adanya transparansi dalam manajemen pemerintahan yang berjalan baik.
4. Gaya kepemimpinan bersifat transformasional melalui perilaku selalu memberikan motivasi, tantangan dan dorongan, dan aktif dalam pengambilan keputusan. Figurnya sebagai seorang pemimpin yang cerdas, aktif, membuatnya dikagumi oleh para pegawai. Iklim relasi yang dibangun dengan para pegawai tergolong baik dan memiliki responsifitas yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan pegawai yang berkaitan dengan kebutuhan kerja.

5. Tantangan kepemimpinan Chusnunia Chalim adalah adanya intervensi partai politik dan organisasi pendukung.

B. Saran

Saran pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala daerah harus bisa menempatkan diri sebagai pembina kepegawaian tingkat daerah dan sebagai kader partai politik, sehingga mampu meminimalisir intervensi dan politisasi partai politik terhadap kebijakan pemerintahan. Perumus kebijakan harus mampu mengakomodasi berbagai macam kepentingan dalam pemerintahan.
2. Kaitannya dengan defisit anggaran yang terjadi, pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan potensi pendapatan daerahnya. Pemerintah daerah harus bekerja lebih maksimal dalam menggali potensi penerimaan yang lebih besar salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan membuka iklim investasi secara luas yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang prima untuk menarik minat investor sehingga arus investasi berjalan secara optimal dan daerah memiliki kemampuan secara mandiri dalam mengelola keuangan daerah tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat.
3. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu pada pengumpulan data dalam bentuk dokumen tentang program dan kebijakan yang dibuat pada kepemimpinan Chusnunia Chalim. Kelemahan penelitian ini dapat terbantu dengan adanya pemberitaan dari media terkait realisasi

program kerjanya selama kurang lebih satu tahun. Peneliti berharap ada penelitian lanjutan terkait dengan tema penelitian ini guna menunjang kompleksitas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Husain dan Purnomo. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta. Refika Aditama
- Jane dan Helen. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kaloh, J. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, Prilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kamla dan Nighat. 1995. *Feminisme dan Elevansinya*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Nazir, 2011. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Safaria, Triantoro. 2004. *Kepemimpinan*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Warning Marilyn, et al. 2000. *Politics: Womens Insight*. New York. Inter Parliamentary Union.
- Yukl, Gary. 2005. *Kepemimpinan dalam organisasi*. Jakarta. Indeks Kelompok Gramedia.
- Andriansyah. 2015. *Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Skripsi/Jurnal

- Dina Fariza Triyani Syarif. 2013. *Persespsi Gaya Kepemimpinan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*. Muhammadiyah Palangkaraya.
- Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhana. 2013. *Perempuan dan Korupsi pada Ranah Publik*. Universitas Diponegoro.
- Fajar Apriani. 2015. *Jurnal Keterwakilan Perempuan dalam Kancah Politik*. Universitas Diponegoro.
- Irwan Abdullah. 2003. *Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial*. Vol 15.
- Jacqueline Lomanjaya. 2014. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional terhadap Kinerja Karyawan*. Universitas Diponegoro.
- Lia Octavina. 2008. *Peranan Kepemimpinan Wanita dalam Jabatan Publik (Studi pada Pegawai Perpajakan)*. Universitas Sumatera Utara.
- Purwati Ayu Rahmi. 2015. *Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya Tri Risma Harini dalam Perspektif Emotional Intelegent*. Universitas Airlangga.
- Sekar Cahyo Laksanti. 2014. *Potret Kepemimpinan Perempuan dari Sudut Pandang Laki-laki*. Universitas Diponegoro.
- Shalahuddin. 2015. *Karakteristik Kepemimpinan Transformasional*. Institut Agama Islam Negeri Jambi.
- Suwaidan. 2015. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan dalam Mengembangkan Hidden Curriculum*. Universitas Negeri Malang.
- Timoty A. Judge dan Ronald F. Picolo. 2004. *Transformational and Transactional Leadership*. University of Florida.

Dokumen

- www.kompas.com, diakses tanggal 15 Agustus 2016, pukul 13.56 WIB.
- www.suryaandalas.com, diakses tanggal 24 Agustus 2016, pukul 11.53 WIB.
- www.setkab.go.id/mendagri-tetapkan-pelaksanaan-pilkada, diakses tanggal 31 Agustus 2016, pukul 16.35 WIB
- www.undp.or.id, diakses tanggal 13 November 2016, pukul 18:55 WIB

www.lampungtimurkab.go.id ,diakses pada 14 November 2016, pukul 21.55 WIB

lampung.tribunnews.com, diakses tanggal 14 November 2016, pukul 21.41 WIB

harianpilar.com, diakses tanggal 14 November 2016, pukul 18:55 WIB

www.unwomen.org, diakses tanggal 14 November 2016, pukul 19.42 WIB

www.voaindonesia.com, diakses tanggal 4 April 2017, pukul

www.jurnas.com, diakses tanggal 4 April 2017, pukul 14.05 WIB

www.kompasiana.com, diakses tanggal 7 April 2017, pukul 10.10 WIB